

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DPRD DKI Didesak Bentuk Pansus Ancol

JAKARTA (Pos-kota) - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli menyebut, bahwa hingga saat ini Panitia Khusus (pansus) sengkabut pengelolaan dan pembangunan sarana dan fasilitas di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PTJA) belum diusulkan ke DPRD.

Menurut Taufik, Komisi B masih akan melanjutkan rapat dengan pihak Ancol. Tapi rapat yang akan datang sifatnya tertutup. "Rapat dipilih tertutup supaya Ancol

lebih bebas membuka data-datanya. Kemungkinan akhir bulan ini," katanya, yang dikutip Senin (17/7).

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko mengatakan, seharusnya Pansus Ancol segera dibentuk. Ia beralasan permasalahan pengelolaan manajemen PTJA termasuk ABC Mall City sudah menjadi atensi dan kegaduhan di masyarakat.

"Seharusnya DPRD DKI segera membentuk pansus.

Karena melalui pansus ini dapat mempercepat investigasi ihwal dugaan kisruhnya manajemen pengelolaan fasilitas di PTJA dan dugaan mangkraknya ABC Mall City," kata Yanuar.

"Jangan sampai DPRD bersuara lambat di awal tapi saat didesak masyarakat untuk membuat pansus malah seperti macan ompong. Yang dikhawatirkan masyarakat adalah jangan sampai hal ini menjadi bersinggungan dengan agenda politisasi jelang Pemi-

lu 2024," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, melalui pansus ini sejatinya DPRD DKI Jakarta bisa mengungkap fakta-fakta terkait isu yang beredar selama ini, sekaligus menjadi alat untuk dilakukannya audit dan pemeriksaan di lapangan.

"Jadi jangan sekedar menelan mentah-mentah laporan yang disampaikan PTJA, turun ke lapangan cek kondisi sebenarnya dan panggil pihak-pihak terkait termasuk para notarisnya yang menjadi sak-

si penandatanganan kerja sama pengelolaan ABC Mall City," katanya.

Terkait status PTJA yang perusahaan Tbk, seyogyanya publik harus menerima informasi dan laporan kinerja sesuai fakta yang ada. "Disinilah peran OJK yang ditunggu masyarakat. Naman-ya perusahaan terbuka, maka keterbukaan informasi kinerja perusahaan harus disampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi kebohongan publik," tukasnya. (*/lfn)